



**RENCANA KERJA
(RENJA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216 Telepon (0293) 492422
Faksimile (0293) 491040 Surat Elektronik . temanggunginspektorat@gmail.com
Laman . www.inspektorat.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

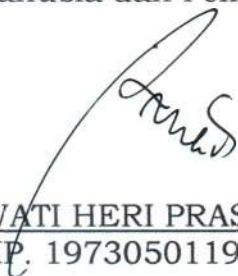
**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

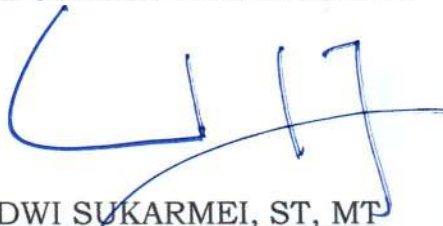
Petugas Verifikator



EKO BUDI MULYANTO, S.E., M.M
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, Juli 2023



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M. AT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	42
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	43
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	50
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	50
2.7 Penghargaan / Prestasi	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	55
4.1 Program dan Kegiatan	55
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s.d Triwulan I Tahun 2023	19
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	31
Tabel 2.4 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022	44
Tabel 2.6 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023	50
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024	52
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024	56
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

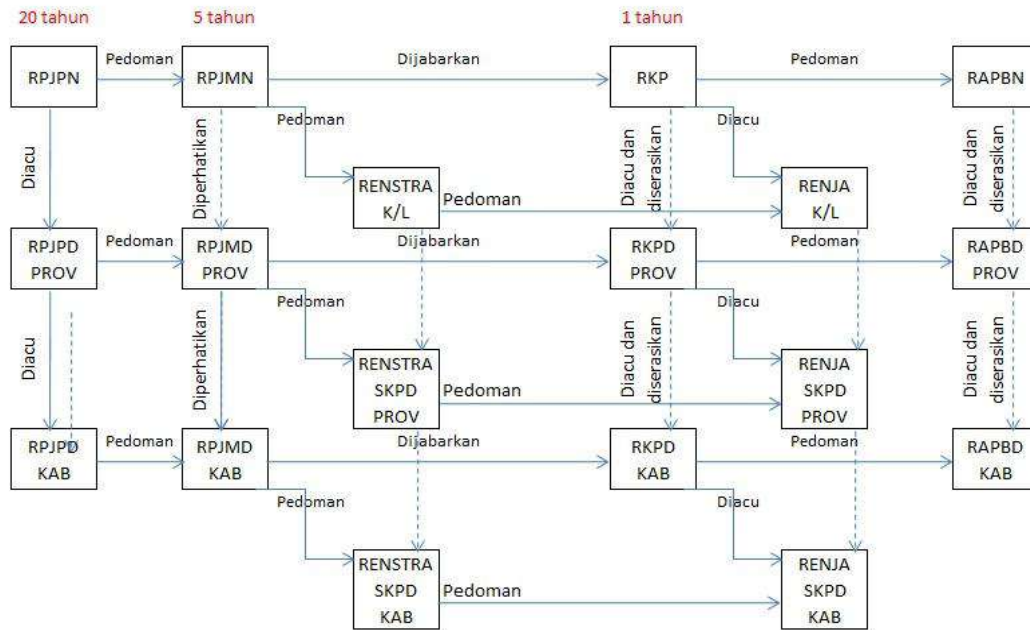
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Inspektorat Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat:
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat. Namun dalam proses ini Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat:

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat :

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Inspektorat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Inspektorat 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.01	PENGAWASAN				5.279.387.681				4.642.388.000	6.209.389.998		6.002.199.265	99,41		
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		-	4.460.887.681	-	-	100	4.434.388.000	5.405.202.648	100	5.190.322.100	100	96,02	
601012.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	4.152.387.681	-	-	12	4.147.388.000	5.112.359.249	12	4.955.091.933	100	96,92	
601012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	-	4.137.387.681	-	-	12	4.137.388.000	5.102.359.249	12	4.491.209.726	100	96,92	
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Bulan	-	-	-	-	12		2.798.759.249	12	2.732.930.708	100	97,65	
		Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	12		2.303.600.000	12	2.212.164.225	100	96,03	
601012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Bulan	-	15.000.000	-	-	12	10.000.000	10.000.000	12	9.997.000	100	99,97	
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682		93,30	
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kegiatan	-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682	100	93,30	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	191.000.000	-	-	12	143.000.000	154.950.000	12	139.734.249		90,18	
601012.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	3.000.000	-	-	12	2.000.000	1.992.100	12	1.977.500	100	99,27	
601012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	-	30.000.000	-	-	12	25.000.000	25.000.000	12	23185500	100	92,74	
601012.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	-	45.000.000	-	-	12	40.000.000	40.000.000	12	33.393.600	100	83,48	
601012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	-	50.000.000	-	-	12	50.000.000	9.828.000	12	9.212.400	100	93,74	
601012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	-	60.000.000	-	-	12	60.000.000	77.131.000	12	73.130.018	100	94,81	
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit					22	-	38.327.500	22	38300.000	100	99,93	
601012.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(2 meja telepon, 9 meja staff)	Unit					21	131.125.000	33.327.500	21	33.300.000	100	99,92	
601012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Papan Nama Identitas kantor	Unit	-	-	-	-	1	65.550.000	5.000.000	1	5.000.000	100	100	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	-	10.000.000	-	-	12	10.000.000	7.993.400	12	6.310.600	100	78.95	
601012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	5.000.000	12	3.352.000	100	67.04	
601012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	2.993.400	12	2.958.600	100	98.84	
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	-	77.500.000	-	-	12	75.000.000	75.999.999	12	71.522.255	100	94.11	
601012.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	-	70.000.000	-	-	12	70.000.000	69.999.999	12	65.528.255	100	93.61	
601012.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	-	7.500.000	-	-	12	5.000.000	6.000.000	12	5.994.000	100	99,90	
	Rata -rata capaian kinerja Program												100		
	Predikat												Sangat Tinggi		
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan				475.000.000					214.347.097	27	196.529.539			
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46				42				80.28		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23				17				38.17		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48				31				15,46		91.17		
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				380.000.000				557.000.000	411.790.250	-	400.870.086				
601022.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja	OPD	-	30.000.000	-	-	3	27.000.000	7.499.650	5	7.353.500	100	98.05		
601022.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP 46 Perangkat daerah, evaluasi SAKIP kabupaten, reviu RKPD, reviu renja PD		-	110.000.000	-	-	47	110.000.000	104.790.600	114	104.724.600	100	99.94		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601022.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ	Dokumen	-	80.000.000	-	-	25	80.000.000	80.000.000	144	79.692.200	100	99.62	
601022.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa	LHP	-	80.000.000	-	-	45	110.000.000	84.500.000	280	83.848.921	100	99	
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	Kegiatan					1	60.000.000	60.000.000	1	58.051.000	100	97	
601022.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			-	-	-	-		230.000.000	75.000.000	-	67.199.865	100	89.60	
		Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	-	-	-	-	115	-	-	132	-	100		
		Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	12	-	100		
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									49.413.500	-	48.761.577		98.68	
601022.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Persen	-	-	-	-	100	15.000.000	10.813.500	100	10.757.777	100	99.48	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	s/d 2021		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
						K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601022.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASB, Reviu HSPK/ SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas	OPD	-	-	-	-	60	80.000.000	38.600.000	144	38.003.800	100	98.46	
Rata -rata capaian kinerja Program												100			
Predikat												Sangat Tinggi			
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								208.000.000	342.983.600	-	323.945.496		94.45	
		Nilai Maturitas SPIP	Angka	2				3,15			3.008		95,49		
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60				40			100		100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100				100			100		100		
		Nilai Survey Penilaian Integritas	%	81,97				81,77			77.37		95		
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										40.478.100		39.445.660	100	97.45	
601032.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
		Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional regional, larwasda, desk PKPT	Kegiatan	-	-	-	-	8	-	-	-	10	-	100	-	
		Tersusunnya Perubahan Perencanaan Pengawasan dan SK Program Pengawasan Tahunan	Buku	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	100	-	
601032.02	Pendampingan dan Asistensi							-	208.000.000	302.505.500	-	284.499.836		94.05		
601032.02.03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			-	-	-	-	-	300.000.000	270.000.000	-	252.399.136	100	93.48		
		Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke Pusat	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	
		Terfasilitasinya pengaduan gratifikasi	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET		
				K	Rp	s/d 2021		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp			
						K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Terlaksanya laporan pajak-pajak pribadi (4000) dan kekayaan melalui aplikasi SIKARKA (500)	Laporan	-	-	-	-	4.500		-	4.616	-	100				
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan audiensi saber pungli	Kegiatan	-	-	-	-	5	-	-	5	-	100				
		Terlaksanya pemenuhan elemen ZI	OPD	-	-	-	-	5	-	-	7	-	100				
601032.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	Kegiatan	-	-	-	-	1	50.000.000	32.505.500	1	32.100.700	100	98.75			
													Rata -rata capaian kinerja Program		100		
																Predikat	Tinggi
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG								4.642.388.000	6.209.389.998		5.963.899.265					
													Rata -rata capaian kinerja Program Kegiatan		100	96.05	
																Predikat	Sangat tinggi
													rata-rata capaian kinerja Program		98.90		
																Predikat	Telah Tercapai

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat
s.d Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021					K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.01	PENGAWASAN				5.279.387.681				6.018.210.827	6.618.139.197	86	1.288.653.526			
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		-	4.460.887.681	-	-	100	5.718.494.827	5.849.707.597	78	1.216.463.530	78,40	20,80	
601012.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	4.152.387.681	-	-	24	5.449.664.827	5.465.382.704	35	1.125.255.674	63	10,31	
601012.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	-	4.137.387.681	-	-	35	5.449.664.827	5.455.382.704	35	1.125.255.674	100	20,63	
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Bulan	-	-	-	-	35		2.840.926.704	35	579.825.396	100	20,41	
		Terpenuhinya Tambahannya Penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	35		2.614.456.000	35	545.430.278	100	20,86	
601012.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Bulan	-	15.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	25	0,00	
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	30.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	100	94,21	
601012.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kegiat an	-	30.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	100	94,21	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	191.000.000	-	-	10,6	172.830.000	172.830.000	2	55.247.186	20	19	
601012.06.0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	3.000.000	-	-	5	2.000.000	2.000.000	-	89.000	-	4,45	
601012.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	-	30.000.000	-	-	12	25.000.000	25.000.000	3	1.640.000	25	6,56	
601012.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	-	45.000.000	-	-	12	35.000.000	35.000.000	3	2.439.750	25	6,97	
601012.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	-	50.000.000	-	-	12	42.830.000	42.830.000	3	1.658.250	25	3,87	
601012.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	-	60.000.000	-	-	12	68.000.000	68.000.000	3	49.420.186	25	72,68	
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit					10	135.000.000	119.999.893	-	-	-	-	
601012.07.0 5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(2 meja telepon, 9 meja staff)	Unit					10	35.000.000	29.999.893	-	-	-	-	
601012.07.1 0	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Papan Nama Identitas kantor	Unit	-	-	-	-	10	100.000.000	90.000.000	-	-	-	-	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021					K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	-	10.000.000	-	-	12	9.000.000	8.999.000	3	872.300	25	10	
601012.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	5.000.000	3	212.500	25	4,25	
601012.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	4.000.000	3.999.000	3	659.800	25	16,50	
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	77.500.000	-	-	44	67.000.000	62.496.000	1	16 246 570	2,22	26,00	
601012.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	70.000.000	-	-	15	60.000.000	60.000.000	1	15.781.570	7	26,30	
601012.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	7.500.000	-	-	6	2.500.000	2.496.000	-	-	-	0,00	
601012.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					23	4.500.000	4.500.000		465.000	-	10,33	
Rata -rata capaian kinerja Program												35,9 7			
Predikat												Sangat rendah			

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan				475.000.000			-		468.715.600	6	49.131.981		10,48	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100				100			100		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46				46			95.77		95.77		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23				23			41.40		41.40		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48				48			93.06		93.06		
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				380.000.000				418.716.000	418.715.600	4	41.653.891	6,75	14,60	
601022.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja	OPD	-	30.000.000	-	-	4	8.000.000	7.999.900	-	3.073.750	-	38,42	
601022.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP 46 Perangkat daerah, evaluasi SAKIP		-	110.000.000	-	-	54	110.000.000	110.000.000	12	16.411.500	22	14,92	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET	
						s/d 2021					K	Rp	K	Rp		K
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		kabupaten, reviu RKPD Perubahan, reviu renja PD														
601022.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ	Dokumen	-	80.000.000	-	-	64	80.000.000	80.000.000		3.968.000	-	4,96		
601022.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa	LHP	-	80.000.000	-	-	52	85.000.000	85.000.000	6	2.914.550	12	3,43		
601022.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	-	-	-	-	180	135.716.000	135.715.700		15.286.091	-	11,26		
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									50.000.000	2	7.478.090	100	25,78		
601022.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Persen	-	-	-	-	5	11.000.000	11.000.000	1	4.961.500	100	45,10		
601022.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASEB, Reviu HSPK/SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas	OPD	-	-	-	-	3	39.000.000	39.000.000	3	2.516.590	100	6,45		
																Rata -rata capaian kinerja Program
																41,72
																Predikat rendah

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								299.716.000	299.716.000	2	23.058.015		7,69	
		Nilai Maturitas SPIIP	Level	3.3				3,30			3.008		91,15		
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60				20			100		100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100				100			100		100		
		Nilai Survey Penilaian Integritas	angka	81,97				81,9 7			77,37		94,39		
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100				100			100		100		
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							1	36.000.000	36.000.000	-	1.544.000	0	4,28	
601032.01.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							1	36.000.000	36.000.000	-	1.544.000	0	4,28	
601032.02	Pendampingan dan Asistensi							-	263.716.000	263.716.000	2	21.514.015		8,16	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp	s/d 2021		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
						K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601032.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	-	-	-	15	230.716.000	230.716.000	4	21.514.015	26,67	9,32	
601032.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	-	-	-	-	10	33.000.000	33.000.000	-	-	0	0	
Rata -rata capaian kinerja Program													7		
Predikat													Sangat Rendah		
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG								6.018.210.827	6.618.139.197		1.288.653.526			
Rata -rata capaian kinerja Program Kegiatan													28,12		
Predikat													Sangat Rendah		
rata-rata capaian kinerja Program													65,06		
Predikat													Sangat Rendah		

Dari Tabel 2.1. diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN target tercapai 100%;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target sudah tercapai 100 %;
 - c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target sudah tercapai 100%;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target tercapai 100 %;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target tercapai 100%;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target tercapai 100%;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu target tercapai 100%;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target tercapai 100%;
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel target tercapai 100%;
 - j. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya target tercapai 100%;

- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target tercapai 100%;
 - l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target tercapai 100%;
 - m. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tercapai 100%;
 - n. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target tercapai 100%;
 - o. Sub Kegiatan Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja target tercapai 100%;
 - p. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja target tercapai 100%;
 - q. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan target tercapai 100%;
 - r. Sub Kegiatan Pengawasan Desa target tercapai 100%;
 - s. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal target tercapai 100%;
 - t. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPSub Kegiatan target tercapai 100%;
 - u. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah target tercapai 100%;
 - v. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu target tercapai 100%;
 - w. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan target tercapai 100%;
 - x. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target tercapai 100%;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut ;
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah target tercapai 167%;

- b. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja target tercapai 576%;
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Desa target tercapai 622% ;
- d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPSub Kegiatan target tercapai 115%;
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu target tercapai 250%;
- e. Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan nasional regional, Larwasda desk PKPT target tercapai 125%
- f. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi target tercapai 108.52%.

3) Pada tahun 2022 tidak ada Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan .

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Telah Tercapai** yaitu dengan nilai **98.90%,**.

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan :
 - a. Indeks Persepsi Anti Korupsi, tercapai 100,3% dari target yang ditentukan yaitu nilai 3,93 tercapai 4,061

2. Indikator Sasaran :
 - a. Persentase tindak lanjut hasil temuan, mencapai 100 %;
 - b. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi mencapai 191 %;
 - c. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara mencapai 225%;
 - d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa mencapai 294%;
 - e. Nilai Maturitas SPIP mencapai 95.49 %;
 - f. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mencapai 100%;
 - g. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi mencapai 100%;
 - h. Nilai Survey Penilaian Integritas mencapai 95%; dan
 - i. Persentase penanganan aduan masyarakat mencapai 100%;

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Data Pokok Perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 1 (satu) Indikator yaitu:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Adapun hasil capaian kinerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2021 (%)	STATUS			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
A	INDIKATOR SASARAN																
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,93	3,95	3,92	3,92	3,61	4,061	4,061	100	TT			
B	INDIKATOR PROGRAM																
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46	n.a	n.a	35,21	80.28	92.96	100	TT			
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%			10	17	23	n.a	n.a	12,37	38.17	43.01	100	TT			

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%			15	31	48	n.a	n.a	15,46	91,17	98.11	100	TT		
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045	3,045	3,045	3,008	3,008	91,15		AT	
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60	n.a	n.a	40	100	100	100	TT		
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100	TT		
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97	n.a	n.a	78,70	77,37	77,37	94,39		AT	
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	100	100	100	100	n. a	n.a	100	100	100	100	TT		
			Capaian Kinerja Sasaran										100	1	0	0
			Capaian Kinerja Program										98,90	7	2	0
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah										99,45	8	2	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

I. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
- nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut :

- Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM);

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
- Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
- Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;
- Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM.

2. Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
 - a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - Keinginan PD untuk segera menyelesaikan Tindak Lanjut temuan untuk perbaikan organisasi;
 - Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
 - b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :
 - Kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - Temuan pemeriksaaan terkait kebijakan lama ditidakklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
 - Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
 - SDM APIP kurang/terbatas.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
 - Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjuti dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
 - Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 - Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
 - a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah
 - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - Permendagri Nomor 86 tahun 2017;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut:

- kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP.,
- Kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP,
- Dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim(terlambat) sehingga waktu reviu terbatas
- Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim.

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.;
- Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;
- Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti;
- Pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain

4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

a. Faktor Pendorong Indikator Kinerja tersebut :

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya,
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

b. Faktor Penghambat Indikator Kinerja tersebut :

- Pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
- banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk mereviu dokumen SECARA mendadak dan dalam

waktu yang singkat (reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) diluar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan;

- Jumlah Personil terbatas

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu;
- Personil melaksanakan tugas tambahan dengan dobel penugasan

5. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD sekolah dan pengadaan barang/jasa

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

- Belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan Pengadaan barang dan Jasa
- Jumlah personil yang terbatas
- Belum semuanya dapat dilakukan pengawasan
- Adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa
- Personil melaksanakan tugas tambahan
- Pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko
- Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya

6. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
 - Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
 - Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - Adanya mutasi pegawai
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
 - Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
 - Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas

7. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi

- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
 - Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
 - Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
 - Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
 - Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

- b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah:
- Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
 - Kurangnya SDM auditor;
 - Kurang pemahamannya OPD mengenai benturan kepentingan;
 - Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;
 - Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung.
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
- Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - Sosialisasi benturan kepentingan;
 - Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

8. Persentase penanganan aduan masyarakat

- a. Faktor Pendorong Indikator tersebut adalah :
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - SOP Pengaduan Masyarakat;
 - Adanya anggaran pendukung kegiatan
- b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :
- Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
 - Belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
 - Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
 - Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN;
 - Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
 - Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

II. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 terdiri dari :

1. Nilai Maturitas SPIP

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda;
- Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :

- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang

- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
 - Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun)
 - Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

2. Nilai Survey Penilaian Integritas

- a. Faktor pendorong Indikator kinerja tersebut :
 - Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- b. Faktor penghambat indikator kinerja tersebut :
 - Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
 - Berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat

III. Capaian indikator dengan status upaya keras pada tahun 2022 telah tercapai.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	INDIKATOR SASARAN						
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,93	3,95
B	INDIKATOR PROGRAM						
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	n.a	10	17	23
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	15	31	48
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	n.a	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 10 indikator kinerja kegiatan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Nilai Maturitas SPIP

Hal ini disebabkan antara lain :

Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;

 - Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
 - b. Nilai Survey Penilaian Integritas

Hal ini disebabkan antara lain :

 - Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
 - b. Upaya peningkatkan Nilai Survei Penilaian Integritas;

- c. Peningkatan Pendampingan Perangkat Daerah yang diusukan menuju ZI;
- d. Upaya Peningkatan Nilai MCP Kabupaten Temanggung;
- e. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- f. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
- g. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- h. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kejasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksananya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kejasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksananya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000
	Pendampingan dan Asistensi					263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000
	Pendampingan dan Asistensi					263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan pembuatan “Pondok Baca Anti Korupsi” yang bertujuan untuk meningkatkan pencegahan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung
2019-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pondok Baca Anti Korupsi	Seluruh masyarakat	APBD	Menyediakan ruang baca dan bahan bacaan tentang Anti Korupsi	Pondok baca	Masyarakat anti korupsi	Inspektorat - 2024

2.7 Penghargaan / Prestasi

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada Level 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	nilai	B	B
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,70	93,70
			Nilai Maturitas SPIP	Level	3,009	3,009
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	angka	2,92	2,92
			Kapabilitas APIP	angka	3	3
			Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	61	61
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	48	48
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	63	63
			Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100

		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	20	20
			Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3	3

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pergeseran antar sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	6.524.492.597		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	6.524.492.597	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.356.597	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.356.597	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.138.106.597	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.133.106.597	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	5000000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.250.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.511.200	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.750.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.011.200	18.738.800
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.000.000	(60.000.000)
a	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	a	Pengadaan Mebel	90.000.000	(60.000.000)
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	(1.000.000)
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	(1.000.000)
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.000.000	

	Jabatan	
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	550.215.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	490.215.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	147.215.000
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	90.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45.000.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	380.921.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67.921.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	67.921.000
2	Pendampingan dan Asistensi	313.000.000
a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70.000.000
b	Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	205.000.000
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.000.000
	JUMLAH	6.524.492.597

	Jabatan	
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	550.215.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	490.215.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	147.215.000
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	90.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45.000.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	380.921.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67.921.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	67.921.000
2	Pendampingan dan Asistensi	313.000.000
a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70.000.000
b	Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	205.000.000
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.000.000
	JUMLAH	6.524.492.597

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2024 hanya terdapat pergeseran antar sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				6.524.492.597					6.515.194.060		
6	01	01				5.593.356.597			Prosentase Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	5.647.323.380		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.133.106.597		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang 12 Dokumen	5.139.573.380
6	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/ bulan	5.124.573.380
6	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	DAU	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.000.000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40.000.000	DAU		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	60.000.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		161.511.200			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Paket 24 Laporan	168.011.200
6	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2.500.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	3.000.000
6	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000
6	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
6	01	01	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		45.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.000.000
6	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.011.200	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.011.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah Paket Mebel , Unit Peralatan dan Sarana Prasarana	150.000.000			Jumlah Paket Mebel , Unit Peralatan dan Sarana Prasarana	20 Unit	160.000.000
6	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Temanggung		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000
6	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		90.000.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.738.800			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Laporan	30.738.800
6	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
6	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
6	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22.738.800	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.738.800

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas , Mebel, Peralatan dan Mesin yang dipelihara	78.000.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas , Mebel, Peralatan dan Mesin yang dipelihara	57 Unit	89.000.000	
6	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	80.000.000	
6	01	01	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Temanggung		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3.000.000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000	
6	01	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5.000.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33 Unit	5.000.000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				550.215.000					552.966.075	
							Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi						Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	72 %	
							Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara						Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	33 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
						Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa					Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79 %		
						Persentase penanganan aduan masyarakat					Persentase penanganan aduan masyarakat	100 %		
						Persentase tindak lanjut hasil temuan					Persentase tindak lanjut hasil temuan	100 %		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	490.215.000			Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	231 Laporan 85 Dokumen	491.966.075
6	01	02	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	10.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	2 Laporan	10.000.000
6	01	02	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	147.215.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	147.215.000
6	01	02	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	61 Laporan	80.000.000
6	01	02	2.01	5	Pengawasan Desa	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	90.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan	90.000.000
6	01	02	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85 Dokumen	164.751.075
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60.000.000			Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	61.000.000
6	01	02	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	15.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	16.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		45.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	45.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					380.921.000					314.904.605
							Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)						Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100 %	
							Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi						Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100 %	
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54 %	
							Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan						Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3 Level	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun		67.921.000			Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun	1 Rekomendasi	
6	01	03	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		67.921.000	DAU		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				Jumlah Pendampingan dan asistensi	313.000.000			Jumlah Pendampingan dan asistensi	7 Kegiatan Perangkat Daerah	314.904.605
6	01	03	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		150.000.000	DAU		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	150.000.000
					Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Temanggung		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi		125.000.000	DAU		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	48 Perangkat Daerah	126.904.605
6	01	03	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Temanggung		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas		38.000.000	DAU		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	1 Perangkat Daerah	38.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,66 %. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.524.492.597,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,66 %. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.524.492.597,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650425 199803 1 003